SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 264 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar selaras dengan sasaran dan tujuan tugas pemerintahan serta untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran pelaksanaan anggaran, perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 34);
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agar Pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Kabupaten serta Instansi terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KETIGA : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025, termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 22 Maret 2025

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 264 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 Maret 2025
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
A	**KEGIATAN AUDIT**												**1.980.738,000**					
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Audit Kinerja	Menilai Capaian Dinas Ketahanan Pangan dan Instansi Terkait Terhadap Ketersediaan Pangan yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) serta aktifitas pengendalian intern terkait dengan pengelolaan risiko penanganan kerawanan pangan	Aspek Kebijakan dan Aspek Pelaksanaan	Mg-I Agustus 2025	Mg-I September 2025	6	10	10	10	40	76	25,300,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Audit Kinerja	Menilai Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Instansi Terkait Terhadap Program/Kegiatan yang meliputi Aspek Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) serta Menilai Kecukupan Desain dan Aktifitas Pengendalian Intern Terkait dengan Pengelolaan Risiko Pembangunan Destinasi Pariwisata	Aspek Kebijakan dan Aspek Pelaksanaan	Mg-I Agustus 2025	Mg-I September 2025	6	10	10	10	40	76	25,300,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
3	Program Kawasan	Audit Kinerja	Menilai Capaian kinerja Dinas	Aspek Kebijakan dan	Mg-IV Feb 2025	Mg-IV Maret	6	10	10	10	40	76	25,300,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
	Permukinan		Perumahan dan Permukiman dan Instansi Terkait terhadap program dan kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E)	Aspek Pelaksanaan		2025												
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-III Juli 2025	Mg-III Agustus 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	
5	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-III Juli 2025	Mg-III Agustus 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
6	Sekretariat	Audit	Menilai ketaatan terha	Aspek Tugas	Mg-III	Mg-III	3	10	10	10	40	73	24,250,	1 LHP	Laptop,	Sedang	Irban I	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
	DPRD	Ketaatan	dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Novembe r 2025	Desembe r 2025							000		ATK			
7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggara n yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-II Juni 2025	Mg-II Juli 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban I	
8	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik	Mg-IV Oktober 2025	Mg-IV November 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban I	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)														
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-IV Juni 2025	Mg-III Juli 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	
11	Biro Umum	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-I s.d IV Septemb er 2025	Mg-IV Oktober 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
12	Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggara n yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-III Agustus 2025	Mg-III September 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban I	
13	Dinas Tenaga Kerja	Audit Ketaatan	Tujuan : Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat Sasaran : Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi tenaga kerja minimal 1.000 Tenaga Kerja selama 5 tahun.	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggara n yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-I Septemb er 2025	Mg-I Oktober 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	
14	Dinas Perhubungan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan	Mg-III Juli 2025	Mg-III Agustus 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)														
15	Biro Pemerintahan dan Kesejateraan Rakyat	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-III Agustus 2025	Mg-II September 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
16	Dinas Kehutanan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Mg-I Novembe r 2025	Mg-I Desember 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				(PPRG)														
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-III Septemb er 2025	Mg-III Oktober 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
18	Dinas Transmigrasi	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggara n yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-II Juli 2025	Mg-II Agustus 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban I	
19	Badan Kepegawaian Daerah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek	Mg-1 Oktober 2025	Mg-I November 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
			oleh pemerintah pusat	Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggara n yang Responsif Gender (PPRG)														
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Audit Ketaatan	Tujuan : Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat Sasaran : Penambahan tunjangan kepala desa dan aparat desa	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-III Oktober 2025	Mg-III November 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif	Mg-I Agustus 2025	Mg-I September 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				Gender (PPRG)														
23	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-III Agustus 2025	Mg-III September 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	
24	Dinas Ketahanan Pangan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggara n yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-II Feb 2025	Mg-II Maret 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Audit Ketaatan	Tujuan : Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar,	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia,	Mg-IV Oktober 2025	Mg-IV November 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
			prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat Sasaran : Penguatan UMKM melalui Pemberian bantuan 1.000 UMKM pertahun.	Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggara n yang Responsif Gender (PPRG)														
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Audit Ketaata n	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggara n yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-II Oktobe r 2025	Mg-II November 2025	3	10	10	10	40	73	24,250, 000	1 LHP	Laptop , ATK	Sedang	Irban I	
27	Dinas Sosial	Audit Ketaata n	Tujuan : Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat Sasaran : Pelaksanaan Bantuan Sosial yang Tepat sasaran	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggara n yang	Mg-II Juni 2025	Mg-II Juli 2025	3	10	10	10	40	73	24,250, 000	1 LHP	Laptop , ATK	Tinggi	Irban I	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				Responsif Gender (PPRG)														
28	Dinas PUPR	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-III September 2025	Mg-III Oktober 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	
29	Dinas Lingkungan Hidup	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-III September 2025	Mg-II Oktober 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III	
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar,	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya	Mg-I September 2025	Mg-IV Oktober 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
			prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)														
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-III September 2025	Mg-III Oktober 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terha dap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran	Mg-II Oktober 2025	Mg-II November 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*						*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*		*(12)*
				n yang Responsif Gender (PPRG)														
33	Dinas Kesehatan	Audit Ketaatan	Tujuan : Menilai ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat Sasaran : Peningkatan gizi ibu dan anak untuk pencegahan stunting. serta Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-II November 2025	Mg-II Desember 2025	3	10	10	10	40	73	24,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Mg-III November 2025	Mg-III Desember 2025	3	10	7	7	28	55	18,340,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	
35	Pengadaan Barang dan Jasa	Probity Audit	Pencegahan korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa strategis (Kegiatan pengadaan barang dan	Probity Audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis	Mg-II Maret, Mg-II Sep, Mg-II Nov	Mg-II April, Mg-II Okt, Mg-II Des 2025	9	12	12	12	48	93	56,602,000	3 LHP	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	Mandatory, Permintaan KPK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
			jasa yang merupakan proyek strategis daerah)	Daerah pada tahapan: a. Perencanaan b. Persiapan c. Pemilihan Penyedia d. Penyusunan Kontrak e. Pelaksanaan Pekerjaan f. Serah Terima	2025													
36	Perencanaan	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Penyaluran Bantuan Sosial	1. Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 2. Kelengkapan Dokumen Pengajuan Bantuan sosial a.l. mencakup : a. Kelengkapan surat permohonan dan proposal b. Memberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah c. Pakta Integritas d. Tidak ada penggelembungan	Mg-III Maret 2025	Mg-III April 2025	3	3	5	15	20	46	15,350,000	1 LHP	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif														
37	Perencanaan	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada Penyaluran Hibah	1. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 2. Kelengkapan Dokumen Pengajuan Hibah, a.l. mencakup : a. Kelengkapan surat permohonan dan proposal b. Memberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah c. Pakta Integritas d. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik	Mg-III Maret 2025	Mg-III April 2025	8	12	20	60	80	180	60,000,000	3 LHP	Laptop, ATK		Irban I, II dan III, Irban Khusus	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif														
38	Penganggaran	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara. *Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. *Audit Perjalanan Dinas difokuskan pada utamanya 3 perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD	1. Perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas 2. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku 3. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas 4. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium sesuai ketentuan	Mg-III Sep 2025	Mg-III Okt 2025	6	9	15	45	45	120	40,200,000	3 LHP	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				berlaku 5. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/standar biaya masing- masing pemerintah daerah													
39	Perencanaan dan Penganggaran	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Pencegahan korupsi terkait program makan bergizi sehat didanai oleh yang APBD Tahun 2025	Dinas-Dinas Terkait	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	2	3	5	5	20	35	11,600,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban Khusus	Mandatory
40	Pengawasan APIP	Pemeriksaaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	Audit dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan daerah	Tindak lanjut terhadap hasil reviu/audit jika terindikasi : a. Merugikan keuangan daerah	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	3	3	5	5	15	31	10,350,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban Khusus	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*						*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*		*(12)*
				b. Penyalahgunaan kewenangan c. Adanya praktir korupsi termasuk penyuapan / gratifikasi / pemerasan														
41	Pemeriksaan Opname Kas	Pemeriksaan	Tujuan : Memastikan pengelolaan kas telah sesuai dengan ketentuan Sasaran : Pengelolaan Kas pada bendahara pengeluaran	Seluruh OPD	Mg II Des 2025	Mg II Des 2025	6	6	30	30	40	112	37,700,000	41 OPD	Laptop, ATK		Irban I, II, dan III	Mandatory
42	Pemeriksaan Kabupaten	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	2 Kabupaten	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	30	30	90	90	300	540	382,632,000	3 LHP	Laptop, ATK		Irban I, III	
43	Pemeriksaan Kabupaten	Pemeriksaan Fisik	Menilai ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat	6 Kabupaten	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	30	30	90	90	180	420	333,432,000	1 LHP	Laptop, ATK		Irban III	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*						*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*		*(12)*
44	Dana BOS	Audit	Penggunaan dana bos sesuai dengan peruntukannya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mg-II Jan, Mg-II Nov 2025	Mg-II Februari, Mg-II Des 2025	12	36	72	72	48	240	259,632,000	6 LHP	Laptop, ATK		Irban I, II, dan III	Mandatory
B	**KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI**												**858,576,000**					
1	Dana Desa	Monitoring	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa	Mg-II,III,IV Februari 2025	Mg-II,III,IV Maret 2025	18	18	30	30	120	216	192,192,000	6 LHM	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory
2	SiLPA	Monitoring	Menilai tingkat penyerapan anggaran	Seluruh OPD	Mg-IV Des 2025	Mg-IV Des 2025	3	3	9	9	84	108	35,190,000	41 LHM	Laptop, ATK		Irban I, II, dan III	Mandatory
3	Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	Monitoring	**Tujuan :** Terciptanya Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi **Sasaran :** 1. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	Seluruh OPD	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	8	8	8	32	40	96	32,080,000	5 LHM	Laptop, ATK		Irban Khusus	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
4	Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, ITJEN KEMENDAGRI, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Seluruh OPD	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	10	10	10	50	180	240	85,100,000	82 LHM	Laptop, ATK		Sekretariat	Mandatory
5	LHKPN / LHKASN	Monitoring	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	Seluruh Pejabat dan Seluruh ASN	Mg-I Januari 2025	Mg-IV Maret 2025	3	3	3	3	18	30	9,930,000	1 LHM	Laptop, ATK		Sekretariat	Mandatory
6	Gratifikasi	Monitoring	**Tujuan :** Membangun Integritas dan Menciptakana Lingkungan yang Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat **Sasaran :** Penyelenggara Pemerintahan	Seluruh OPD	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	3	3	3	6	24	39	12,870,000	1 LHM	Laptop, ATK		Irban Khusus	Mandatory
7	Reformasi Birokrasi	Evaluasi	**Tujuan :** Menilai dan mengevaluasi Proses Pelaksanaan Reformasi Birokrasi **Sasaran :** 1. Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi 2. Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi	Seluruh OPD	Mg-I Maret dan Des 2025	Mg-IV April, dan Des 2025	12	20	20	20	40	112	37,800,000	2 LHE	Laptop, ATK		Irban III	Mandatory
8	LKJiP	Evaluasi	**Tujuan :** Memperoleh Informasi Tentang Implementasi, Menilai Tingkat Implementasi, Memberikan saran Perbaikan untuk Peningkatan implementasi dan Memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya **Sasaran :** Tersedianya laporan	Seluruh OPD	Mg-I Juli 2025	Mg-I Agustus 2025	12	6	6	12	84	120	39,360,000	41 LHE	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
			kinerja yang memadai dan berkualitas															
9	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Evaluasi	**Tujuan :** Mengumpulkan dan menganalisis Data Secara Sistematis Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah **Sasaran :** Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Memadai dan Berkualitas	Seluruh OPD	Mg-IV Februari, IV Maret 2025	Mg-I April 2025	3	4	4	16	16	43	14,410,000	6 LHE	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory
10	Monitoring Center of Prevention (MCP)	Evaluasi	**Tujuan :** Memastikan pemenuhan ketersediaan data/dokumen terkait MCP KPK RI. **Sasaran :** Untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah.	OPD pengampu MCP Provinsi Sulawesi Barat	Mg-IV Septemb er, Mg-IV Oktober, 2025	Mg-IV Oktober, Mg-IV November 2025	12	12	16	16	80	136	56,440,000	5 LHE	Laptop, ATK		Irban Khusus	Mandatory
11	Telaahan Sejawat	Pengawasan Internal	**Tujuan :** 1. Melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi 2. Menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan standar audit 3. Memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai	1. Kesesuaian visi, misi, tugas, dan fungsi 2. Penerapan praktik audit sesuai dengan standar 3. Komposisi penge	Mg-I Jan 2025	Mg-I Feb 2025	5	20	16	16	64	121	40,270,000	4 LHP	Laptop, ATK		Irban I, II, III dan Irbansus	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
			Sasaran : Menilai kesesuaian hasil pemeriksaan dengan aturan yang berlaku	tahuan dan keterampilan auditor 4. Kertas kerja dan teknik audit yang digunakan auditor 5. Harapan dari pemangku kepentingan 6. Nilai tambah yang diberikan audit intern 7. Proses tata kelola APIP														
12	Telaahan Sejawat	Pengawasan Eksternal	Tujuan : 1. Melakukan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi	1. Kesesuaian visi, misi, tugas, dan	Mg-I Mei 2025	Mg-I Juni 2025	5	5	6	6	42	64	302,934,000	1 LHP	Laptop, ATK		Sekretariat, Irban I, II III dan Irsus	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
			organisasi 2. Menyatakan pendapat tentang kesesuaian aktivitas APIP dengan standar audit 3. Memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai **Sasaran :** Menilai kesesuaian hasil pemeriksaan dengan aturan yang berlaku	fungsi 2. Penerapan praktik audit sesuai dengan standar 3. Komposisi pengetahuan dan keterampilan auditor 4. Kertas kerja dan teknik audit yang digunakan auditor 5. Harapan dari pemangku kepentingan 6. Nilai tambah yang													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				diberi kan audit intern 7. Proses tata kelola APIP														
C	**KEGIATAN REVIU**												**617,368,000**					
1	LKPD Pemprov	Reviu	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintah	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modefikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarka	Mg-III Februari 2025	Mg-III Maret 2025	5	10	10	10	50	85	28,150,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.														
2	LKPD OPD	Reviu	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintah	Seluruh OPD	Mg-I Februari 2025	Mg-IV Februari 2025	3	3	9	9	108	132	42,870,000	41 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory
3	LPPD Pemprov	Reviu	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Seluruh OPD se-Pemprov	Mg-IV Februari 2025	Mg-IV Maret 2025	3	3	5	5	20	36	11,950,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
4	Perencanaan	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pokok	1. Kelengkapan Dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran 2. Kesesuian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD 3. Penyajian Substansi Rancangan RKPD dan Pokok Pikiran 4. Kesesuaian nama program	Mg-II Mei 2025	Mg-III Juni 2025	3	5	5	5	20	38	12,650,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima 5. Manfaat per program/kegiatan dan pokok pokiran terhadap pembangunan daerah														
5	Perencanaan	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan	1. Kelengkapan Dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikira	Mg-IV Juni 2025	Mg-IV Juli 2025	3	5	5	5	20	38	12,650,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				n 2. Kesesuian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD 3. Penyajian Substansi Rancangan RKPD dan Pokok Pikiran 4. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima 5. Manfa													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				at per program/kegiatan dan pokok pokiran terhadap pembangunan daerah														
6	Perencanaan	Reviu	Meningkatnya Rencana Kerja Pokok Daerah (Renja PD).	1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Pengujian atas penyusunan subst	Mg-IV April 2025	Mg-IV Mei 2025	3	3	18	18	126	168	54,840,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				ansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah														
7	Perencanaan	Reviu	Meningkatnya Rencana	1	Mg II	Mg I	3	3	6	9	10	132	42.870,	1 LHR	Laptop,		Irban I, II	Manda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
			Kerja Perubahan Daerah (Renja PD).	Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Pengujian atas penyusunan substansi antarbab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah. 3. Pengu	Agustus 2025	September 2025					8		000		ATK		dan III	tory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				jian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.														
8	Penganggaran	Reviu	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	1. Pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas	Mg-IV Mei 2025	Mg-III Juni 2025	3	5	5	5	20	38	12,650,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, meliputi: a.													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah.														
9	Penganggaran	Reviu	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan	1. Pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang	Mg-IVJuli 2025	Mg-III Agustus 2025	3	5	5	5	20	38	12,650,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				na kerja perangkat daerah. 2. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah.													
10	Penganggaran	Reviu	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana kerja	1. Kepala	Mg-II Agustus	Mg-IV September	3	3	9	9	10	132	42,870,000	41 LHR	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
			anggaran pokok 2026berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	uaian RKA dengan Renja dan Informasi Kinerja 2. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu lokasi 3. Kesesuaian rincian sumber dana RKA 4. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja 5. Kelayakan	2025	2025												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				anggaran untuk menghasilkan output kegiatan														
11	Penganggaran	Reviu	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana kerja anggaran perubahan 2025 berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	1. Kesesuaian RKA dengan Renja dan Informasi Kinerja 2. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu lokasi 3. Kesesuaian rincian sumber dana RKA 4. Kesesuaian alokasi angga	Mg-I September 2025	Mg-III September 2025	3	3	9	9	108	132	42,870,000	41 LHR	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				randengan pokok kebijakan belanja 5. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan														
12	Penganggaran	Reviu	Penyusunan SHS yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga	1. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan 2. Adanya sinergi bersama instansi terkait	Mg-I Juni 2025	Mg-IV Juli 2025	2	3	5	5	25	40	13,200,000	4 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				(BPS, Bank Indonesia dll) 3. Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembanding berdasarkan kondisi terkini 4. Kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan angga													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				ran pemerintah daerah 5. Ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai Ketentuan 6. SHS disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan 7. Implementasi SHS dalam penatausahaan keuangan daerah													
13	Penganggaran	Reviu	Penyusunan Analisis	1	Mg I Mei	Mg IV Juni	2	3	5	5	25	40	13,200,	4 LHR	Laptop,		Irban I	Manda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
			Standar Biaya (ASB) berdasarkan Kebutuhan Anggaran Pemerintah Daerah	Adanya Tim Penyusun Analisis Standar Biaya (ASB) 2. Kelengkapan ASB berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 3. Kesesuaian ASB berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementrian teknis	2025	2025							000		ATK			tory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				4. Ketepatan waktu pengesahan ASB sesuai Ketentuan 5. ASB disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan 7. Implementasi ASB pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*						*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*		*(12)*
14	Penyerapan Anggaran dan PBJ	Reviu	Menilai Kesesuaian Tingkat Penyerapan anggaran dan Belanja daerah sesuai dengan aturan yang berlaku	Seluruh OPD	Mg-IV Maret, Mg-IV Juni, Mg-IV Sep, Minggu IV Des 2025	Mg III Apr, Mg III Juli, Minggu III Oktober, Minggu III Des 2025	12	12	20	20	40	104	35,000,000	4 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory
15	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Reviu	**Tujuan :** Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan dan Keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan capaian Output Kegiatan Dak Fisik Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku **Sasaran :** Penyaluran dana DAK	OPD Penerima DAK	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	2	3	3	9	6	23	7,780,000	3 LHR	Laptop, ATK		Irban I, II, III	Mandatory
16	Tata Kelola Barang Milik Daerah	Reviu	a. Reviu Terhadap Pengadaan Tanah b. Reviu terhadap Pemanfaatan BMD	a. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran). b. Badan Penge	Mg-I Maret, Mg-I Oktober 2025	Mg-I April, Mg-I November 2025	4	6	6	18	12	46	15,560,000	2 LHR	Laptop, ATK		Irban I, II dan III	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				lola Keuangan dan Pendapatan Daerah (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut)														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				c. Dinas Pariwisata (terkait pemanfaatan Aset Taman Wisata Bukit Jati Gentungan)														
17	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Reviu	Tujuan : Memberikan Keyakinan Terbatas Tata Kelola Penerimaan Pajak dan Retriubusi Daerah Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Sasaran : Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Provinsi	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	2	3	3	9	6	23	7,780,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory
18	Manajemen ASN	Reviu	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi dan Mutasi ASN	Badan Kepegawaian daerah	Mg-I Nov 2025	Mg-I Des 2025	2	3	3	9	6	23	7,780,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban Khusus	Mandatory
19	Perencanaan dan Penganggaran	Reviu	Reviu Penyesuaian Efisiensi Belanja Daerah	Dinas-Dinas Terkait	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	2	3	5	15	20	45	15.000,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban Khusus	
20	Pelayanan Publik	Reviu Kinerja	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perk	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	4	5	15	15	20	59	46,262,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				ada SK Kada, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis) b. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizi													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				nan c. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekom													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				endasi teknis) d. Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), penggunaan aplikasi layanan publik (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan e														

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme SDM pelaksana pelayanan publik sektor perizinan f. Adanya Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan dan ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan publik sektor perizi													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				nan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA g. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor perizinan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor peizinan (termasuk													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan. Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/ gratifikasi/pemerasan layan													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				an publik sektor periizinan (termasuk rekomendasi teknis)														
21	Pelayanan Publik	Reviu Kinerja	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru	a. Kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/pemerasan b. Transparansi layanan sehingga mencegah terjadi	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	4	5	15	15	20	59	46,262,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban III	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				nya penyuapan/ gratifikasi/pemerasan c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendiidkan, termasuk status penanganan penga													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				duand. Inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/pemerasan														
22	Pelayanan Publik	Reviu Kinerja	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Kesehatan tanpa penyuapan/gratifikasi/peme rasan	a. Kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/pemerasan b. Trans	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	4	5	15	15	20	59	46,262,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban II	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				paransi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/pemerasan c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penan-													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*						*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*		*(12)*
				layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan d. Inovasi pelayanan publik sektor kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/pemerasan													
23	Pelayanan Publik	Reviu Kinerja	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	4	5	15	15	20	59	46,262,000	1 LHR	Laptop, ATK		Irban I	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/pemerasan b. Transparansi layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan c. Adanya kanal pengaduan													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				untuk menyampaikan saran/masukan/keluhan terkait layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk status penanganan pengaduan di Inova													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				si pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/pemerasan														
D	**KEGIATAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP**												**336,180,000**					
1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Penilaian Mandiri	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: 1. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemer	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	12	12	20	20	80	144	47,800,000	1 LH Penilaian Mandiri	Laptop, ATK		Sekretariat	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				intah 2. Pengelolaan sumber daya manusia 3. Praktik profesional 4. Akuntabilitas dan manajemen kinerja 5. Budaya dan hubungan organisasi 6. Struktur tata kelola														
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Quality Assurance keandalan pelaksanaan SPIP Pemerintah di	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	12	12	20	20	80	144	47,800,000	1 LH Penilaian Mandiri	Laptop, ATK		Sekretariat dan Irban I	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				Lingkungan pemerintah daerah yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Intern													
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Asistensi	Meningkatnya penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks , yaitu	Mg-I Juli 2025	Mg-I Agustus 2025	2	5	5	15	10	37	12,500,000	1 LH Asistensi	Laptop, ATK		Sekretariat	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				a. Infrastrutur 1. Kepemimpinan; 2. Strategi dan Kebijakan Manajemen 3. Sumber Daya Manusia 4. Kemitraan 5. Proses Manajemen Risiko b. Hasil 1. Aktivitas Penanganan Risiko 2. Outcomes													
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pendidikan dan Pelatihan APIP	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	7		35	35	35	112	228,080,000	Sertifikat	Laptop, ATK		Sekretariat	Mandatory

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				pelatihan/bimbingan teknis terkait : a. Pengawasan Pelayanan Publik b. Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) c. Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) d. Pengawasan Barang dan Jasa e. Pengawasan Manajemen Rumah Sakit f.													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				Audit Kinerja g. Perencanaan dan Pengawasan Berbasis Risiko (PPB R) h. Audit Investigasi i. Pemeriksaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal j. Certified Goverment Chief Audit Executif (CGC AE) dan k. Pendidikan Sertifikasi di													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
				Bidang Pengawasan Lainnya l. Audit Ketaatan														
E	**KEGIATAN PENDUKUNG PENGAWASAN**												**490,811,200**					
1	Survei Penegakan Integritas (SPI)	Pendukung	**Tujuan :** Untuk menilai Indeks Integritas Pemerintah Daerah **Sasaran :** Responden Internal (Pegawai/ASN), Exsternal (Pengguna layanan publik) dan ekspert (Ahli)	Inspektorat Prov. Sulbar	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	9	9	9	12	30	69	25,830,000	1 LHM	Laptop, ATK		Irban Khusus	
2	Monitoring Inflasi Daerah	Pendukung	**Tujuan :** Untuk memastikan rangkaian kegiatan pelaksanaan pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku **Sasaran :** Kegiatan Pengendalian Inflasi Daeah Se-Provinsi Sulawesi Barat (6 Kabupaten + 9 OPD Pengampu)	Inspektorat Prov. Sulbar	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	32	32	48	64	160	336	117,300,000	12 LHM	Laptop, ATK		Irban Khusus	
3	Pembinaan Desa Anti Korupsi	Pendukung	**Tujuan :** Untuk melakukan pengenalan/verifikasi dan valisasi terhadap desa yang memenuhi kriteria desa Anti Korupsi. Sasaran : Desa - Desa di 6 (enam) Kabupaten se - Provinsi Sulawesi Barat yang akan	Inspektorat Prov. Sulbar	Jan - Juni 2025	Jan - Juni 2025	12	12	16	16	80	136	54,080,000	1 LHM	Laptop, ATK		Irban Khusus	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban Pengampu	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
			di ajukan Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti nominasi sebagai calon desa anti korupsi.															
4	Sosialisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pendukung	**Tujuan :** Melakukan penyidikan terhadap tidak pidana tertentu yang dilakukan PNS lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Sasaran : Pegawai/ASN yang melakukan tindakan pidana tertentu.	Inspektorat Prov. Sulbar	Jan - Des 2025	Jan - Des 2025	6	12	12	12	48	90	29,940,000	1 Dokumen	Laptop, ATK		Irban Khusus	
5	Penyusunan Peta Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Tahun 2025	Pendukung	Terciptanya Program kerja pengawasan yang terorganisir dan berbasis risiko	Inspektorat Prov. Sulbar	Mg-I Nov 2025	Mg- I Des 2025	6	12	12	12	48	90	29,940,000	1 Dokumen	Laptop, ATK		Sekretariat	
6	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (RAKORWASNAS)	Pendukung	Terciptanya Program kerja pengawasan yang tesinkronisasi	Kebijakan Pengawasan Nasional	Mg-III Nov 2025	Mg-III Nov 2025	4	20	24	24	40	112	29,437,600	1 Laporan Kegiatan	Laptop, ATK		Sekretariat	
7	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA)	Pendukung	Terciptanya Program kerja pengawasan yang tesinkronisasi	Kebijakan Pengawasan Daerah	Mg-III Februari 2025	Mg-III Februari 2025	4	20	40	24	240	328	204,283,600	1 Laporan Kegiatan	Laptop, ATK		Sekretariat	
	TOTAL												**4.283.673.200**					

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara